

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa: Strategi Alokasi Anggaran Desa Berbasis Prioritas yang Berlandaskan Kinerja Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan

Nurul Listiawati^{1*}, A. Nur Farahdiba Suriadi², Hisyam Ichsan³, dan Taufik Hidayat B. Tahawa⁴

^{1,2,3,4} Universitas Sulawesi Barat, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 30 August 25

Final Revision: 26 September 25

Accepted: 02 October 25

Online Publication: 31 December 25

KEYWORDS

Sustainable Development Goals (SDGs), Budget Allocation, Village, Performance Base, Mixed Method

KATA KUNCI

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (SDGs), Alokasi Anggaran, Desa, Basis Kinerja, Metode Campuran

CORRESPONDING AUTHOR

nurullistiawati@unsulbar.ac.id

DOI

10.37034/jems.v8i1.232

ABSTRACT

The massive allocation of village funds faces a crucial challenge in ensuring the effectiveness of resource distribution for multidimensional development performance. Field realities show that budget management practices are often trapped in administrative routines and are not fully performance-based, potentially leading to inefficiency. This study aims to (1) analyze the influence of Village Fund allocation on the performance of SDGs pillars, (2) identify the strategic factors explaining performance disparities between villages, and (3) develop a priority-based budget allocation strategy model. This research employs a mixed-methods design, beginning with a panel data regression analysis of 62 villages in Majene Regency (2022-2024), followed by an in-depth comparative case study of two villages. Quantitative analysis surprisingly reveals that Village Fund allocation has a significant negative correlation with the performance of social, economic, and environmental pillars, indicating a systemic effectiveness issue. Qualitative analysis uncovers that high-performing villages successfully defy this trend through a "strategic investment" paradigm, supported by visionary leadership, data-driven planning, and a focus on flagship programs. Conversely, stagnant-performing villages are trapped in an "administrative routine" paradigm and a cycle of "infrastructure patching." This study concludes that the quality of allocation strategy, rather than the fund's magnitude, is the primary determinant of village development success.

ABSTRAK

Pengelolaan anggaran desa yang masif menghadapi tantangan krusial dalam memastikan efektivitas alokasi untuk peningkatan kinerja pembangunan multidimensi. Realitas di lapangan menunjukkan praktik pengelolaan anggaran seringkali terjebak dalam rutinitas administratif dan belum sepenuhnya berbasis kinerja, yang berpotensi menimbulkan inefisiensi. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaruh alokasi dana desa terhadap kinerja pilar SDGs, (2) mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang menjelaskan perbedaan kinerja antar desa, dan (3) mengembangkan model strategi prioritas alokasi anggaran. Penelitian ini menggunakan desain metode campuran, diawali dengan analisis regresi data panel terhadap 62 desa di Kabupaten Majene (2022-2024), dilanjutkan dengan studi kasus komparatif mendalam di dua desa. Hasil analisis kuantitatif secara mengejutkan menunjukkan bahwa alokasi dana desa berkorelasi negatif signifikan dengan kinerja pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan, mengindikasikan adanya masalah efektivitas sistemik. Analisis kualitatif mengungkap bahwa desa berkinerja tinggi berhasil mematahkan tren ini melalui paradigma "investasi strategis" yang ditopang oleh kepemimpinan visioner, perencanaan berbasis data, dan fokus pada program unggulan. Sebaliknya, desa berkinerja stagnan terjebak dalam paradigma "administrasi rutin" dan siklus "tambal sulam infrastruktur". Penelitian ini menyimpulkan bahwa kualitas strategi alokasi, bukan besaran dana, adalah determinan utama keberhasilan pembangunan desa.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Pembangunan berkelanjutan telah menjadi agenda sentral pembangunan global yang diwujudkan melalui *Sustainable Development Goals (SDGs)*, sebuah kerangka kerja universal yang diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB [1]. Indonesia, sebagai negara yang

berkomitmen penuh pada agenda ini, tidak hanya mengadopsinya di tingkat nasional tetapi juga menerjemahkannya hingga ke tingkat pemerintahan terendah melalui program SDGs Desa. Inisiatif ini merupakan langkah progresif yang merancang 18 tujuan pembangunan spesifik untuk konteks lokal desa, dengan penekanan kuat pada prinsip *no one left behind*, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan [2], [3]. Untuk mencapai tujuan

ambisius ini, pemerintah desa dibekali dengan instrumen fiskal yang kuat, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), di mana dana desa menjadi komponen utamanya, yang secara konsisten dialokasikan dalam jumlah masif oleh pemerintah pusat [4], [5].

Alokasi dana desa yang besar setiap tahunnya memberikan otonomi dan sumber daya yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi desa untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan di bidang sosial (pendidikan, kesehatan), ekonomi (ketahanan pangan, pemberdayaan), dan lingkungan (air bersih, pengelolaan sampah) [6], [7], [8]. Secara normatif dan teoritis, peningkatan alokasi dana ini diharapkan berkorelasi positif dengan peningkatan kinerja pembangunan. Logika dasarnya adalah bahwa dengan sumber daya yang lebih besar, desa memiliki kapasitas lebih untuk mengimplementasikan program-program yang lebih berkualitas dan berdampak luas.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan sebuah paradoks yang kompleks dan sering kali problematik. Praktik pengelolaan anggaran di banyak desa masih sering terjebak dalam rutinitas administratif, di mana fokus utamanya adalah penyerapan anggaran dan kepatuhan pelaporan, bukan pada pencapaian kinerja (*performance-based*) [9]. Lebih lanjut, proses alokasi sering kali dipengaruhi oleh faktor-faktor non-teknis seperti kapasitas aparat desa yang terbatas dalam perencanaan strategis, dinamika politik lokal yang mendorong pemerataan alokasi demi stabilitas, dan kurangnya pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan [10], [11], [12]. Akibatnya, efektivitas dana desa dalam mendorong pencapaian target SDGs secara multidimensi menjadi pertanyaan krusial yang memerlukan investigasi mendalam.

Kondisi ini menciptakan sebuah kesenjangan yang signifikan antara harapan kebijakan dan implementasi di lapangan. Temuan awal dalam penelitian ini mengkonfirmasi adanya potensi inefisiensi sistemik. Analisis data panel awal terhadap 62 desa di Kabupaten Majene secara mengejutkan menunjukkan bahwa alokasi dana desa yang lebih besar justru berkorelasi negatif dengan skor kinerja pilar-pilar SDGs. Fenomena ini mengisyaratkan bahwa besaran dana bukanlah jaminan keberhasilan; strategi alokasi dan kualitas tata kelola diduga memainkan peran yang jauh lebih fundamental. Variabel-variabel inilah yang diduga menjadi moderator kunci yang menentukan apakah dana desa akan menjadi katalisator kemajuan atau hanya menjadi dana rutin yang habis tanpa dampak signifikan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi mendesak untuk membongkar teka-teki tersebut, menjelaskan mekanisme di balik paradoks efektivitas dana desa, dan mengembangkan sebuah kerangka kerja strategis yang dapat membantu desa mengoptimalkan penggunaan anggarannya.

Berdasarkan latar belakang yang kompleks tersebut, penelitian ini merumuskan serangkaian pertanyaan penelitian yang saling terkait: (1) Bagaimana pengaruh alokasi dana desa terhadap kinerja pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan berdasarkan Indikator SDGs Desa secara statistik?; (2) Mengapa terjadi kesenjangan kinerja antar desa (anomali positif vs. ilustrasi tipikal) meskipun dengan alokasi dana desa yang sebanding, dan faktor-faktor kualitatif (strategi, kepemimpinan, tata kelola) apa yang menjelaskan kesenjangan tersebut?; (3) Bagaimana model strategi prioritas alokasi anggaran desa yang optimal dapat dikembangkan berdasarkan sintesis bukti empiris dan pemahaman kontekstual untuk meningkatkan pencapaian SDGs desa secara efektif?

1.2. Tinjauan Literatur dan Hipotesis

Literatur mengenai pengelolaan keuangan desa telah berkembang pesat seiring dengan meningkatnya transfer fiskal ke desa. Studi-studi awal banyak berfokus pada aspek akuntabilitas [13], [14]. Selain itu, transparansi juga dianggap sebagai prasyarat penting bagi tata kelola yang baik [15], [16]. Aspek partisipasi masyarakat juga menjadi sorotan utama, di mana keterlibatan publik dalam siklus perencanaan dan penganggaran diyakini dapat meningkatkan kualitas belanja desa dan rasa memiliki terhadap program [17], [18].

Seiring berjalannya waktu, fokus penelitian mulai bergeser dari sekadar proses ke dampak. Beberapa peneliti mencoba mengukur pengaruh dana desa terhadap indikator kesejahteraan tertentu. Misalnya, penelitian tertentu mengkaji pengaruh dana desa terhadap kemiskinan [19]. Sementara penelitian lain menganalisis efektivitasnya melalui rasio-rasio keuangan tradisional [4]. Namun, pendekatan ini sering kali bersifat parsial dan belum mampu menangkap dampak multidimensi dari pembangunan desa sebagaimana yang diamanatkan oleh kerangka SDGs.

Meskipun kontribusi studi-studi ini sangat penting, tinjauan literatur yang mendalam menyoroti adanya beberapa kesenjangan (*gap*) yang signifikan. Kesenjangan pertama terletak pada kurangnya analisis yang secara sistematis dan eksplisit menghubungkan struktur alokasi anggaran (komposisi belanja) dengan kinerja capaian yang multidimensi sebagaimana direpresentasikan oleh pilar-pilar indikator SDGs desa (sosial, ekonomi, dan lingkungan), dimana hal ini sejalan dengan argumen mengenai pentingnya analisis kontribusi anggaran terhadap SDGs [20]. Selanjutnya, kajian terkait SDGs di tingkat desa sering kali masih terbatas pada pendekatan deskriptif atau korelasional parsial, seperti pengukuran capaian atau analisis kesesuaian dokumen perencanaan [12], [21]. Penelitian yang menguji hubungan kausal pun sering kali bersifat administratif [22], [23] atau korelasional sederhana [24], sehingga belum banyak dikembangkan model strategis yang komprehensif. Kondisi ini menegaskan adanya kebutuhan mendesak akan model manajemen anggaran desa yang lebih adaptif, berbasis bukti, dan berorientasi

pada pencapaian *outcome* [25]. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk mengisi celah-celah tersebut dengan mengembangkan model solusi yang terintegrasi dan strategis, yang merupakan sebuah kebaruan (*novelty*) dalam khazanah penelitian keuangan desa.

Berdasarkan landasan teori bahwa dana desa merupakan instrumen fiskal yang dirancang untuk mendorong pembangunan, maka secara normatif seharusnya terdapat hubungan positif antara alokasi dana dengan kinerja pembangunan. Dana yang lebih besar seharusnya memungkinkan desa untuk menjalankan lebih banyak program yang berkualitas, yang pada gilirannya akan meningkatkan skor pada pilar-pilar kinerja SDGs. Dari perspektif teori agensi, pemerintah desa sebagai agen diharapkan menggunakan sumber daya dari prinsipal (pemerintah/ masyarakat) untuk memaksimalkan kesejahteraan

Alokasi anggaran yang diarahkan pada sektor sosial, seperti peningkatan sarana Posyandu, pemberian insentif bagi guru PAUD, atau program penanganan *stunting*, diharapkan mampu memberikan dampak langsung pada indikator-indikator kesehatan dan pendidikan. Harapan ini didasarkan pada logika bahwa investasi pada aspek sosial akan meningkatkan kualitas layanan dasar masyarakat. Oleh karena itu, hipotesis pertama yang diajukan adalah:

H1: Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pilar Sosial SDGs Desa.

Demikian pula, investasi dana desa pada sektor-sektor produktif, seperti bantuan pertanian, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), atau pelatihan bagi UMKM, diperkirakan akan mendorong aktivitas ekonomi lokal. Peningkatan aktivitas ini diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Hal tersebut akan tercermin pada peningkatan skor kinerja pilar ekonomi, sehingga hipotesis kedua dirumuskan sebagai:

H2: Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pilar Ekonomi SDGs Desa.

Pada pilar lingkungan, program-program yang didanai oleh dana desa, seperti pembangunan sarana air bersih, sistem pengelolaan sampah, atau kegiatan konservasi sumber daya alam, secara teoritis akan berkontribusi pada perbaikan kualitas lingkungan desa. Upaya ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan demikian, hipotesis ketiga diajukan:

H3: Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap kinerja pilar Lingkungan SDGs Desa.

Pengujian hipotesis ini menjadi langkah awal yang krusial. Apapun hasilnya, baik hipotesis diterima maupun ditolak, temuan tersebut akan menjadi titik berangkat untuk analisis kualitatif yang lebih mendalam. Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan "mengapa"

dan "bagaimana" hubungan tersebut terjadi di lapangan, sebagaimana diamanatkan oleh desain metode campuran penelitian ini.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi desain metode campuran dengan pendekatan studi kasus komparatif yang terinformasi secara kuantitatif (*quantitatively-informed comparative case study*). Desain ini dipilih karena kemampuannya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kompleks mengenai efektivitas dan strategi alokasi dana desa. Pendekatan ini secara unik mengintegrasikan kekuatan analisis statistik untuk mengidentifikasi tren umum dan anomali dalam data set yang besar, dengan kedalaman analisis kualitatif untuk menjelaskan mekanisme kausal, konteks, dan proses di balik tren tersebut, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih holistik.

Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Data Sekunder meliputi data alokasi Dana Desa per desa per tahun (2022-2024), dan data kinerja SDGs Desa per desa per tahun (2022-2024) dari basis data resmi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi. Data Primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam (*In-depth Interviews*) dengan informan kunci (Kepala Desa dan Ketua BPD) di kedua desa studi kasus, dan analisis dokumen RPJMDes dan RKPDes untuk triangulasi

Analisis data kuantitatif menggunakan teknik analisis regresi data panel. Tiga model regresi terpisah dijalankan untuk menghindari masalah multikolinieritas sempurna. Model-model tersebut dapat dilihat pada Persamaan (1), (2) dan (3).

$$Kinerja_Sosial_it = \beta_0 + \beta_1(Dana_Desa_it) + \alpha_i + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

$$Kinerja_Ekonomi_it = \beta_0 + \beta_1(Dana_Desa_it) + \alpha_i + \varepsilon_{it} \quad (2)$$

$$Kinerja_Lingkungan_it = \beta_0 + \beta_1(Dana_Desa_it) + \alpha_i + \varepsilon_{it} \quad (3)$$

Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak WarpPLS 8.0. Analisis data kualitatif menggunakan analisis tematik komparatif, yang meliputi transkripsi, *coding* terbuka (*within-case analysis*), dan *coding* aksial dan komparatif (*cross-case analysis*).

Populasi penelitian ini mencakup seluruh desa di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat. Sampel pada tahap kuantitatif terdiri dari 62 desa yang memiliki data lengkap untuk periode 2022–2024. Sementara itu, pada tahap kualitatif digunakan teknik *purposive sampling* yang berorientasi pada teori.

Alur penelitian dirancang dalam tiga fase utama yang saling terkait dan sekuensial:

- a) Fase 1: Analisis Kuantitatif: Tahap ini bertujuan untuk menguji secara statistik pengaruh alokasi dana desa terhadap kinerja tiga pilar SDGs (Sosial,

Ekonomi, dan Lingkungan) di seluruh sampel desa. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi pola hubungan, signifikansi, dan arah pengaruh secara umum, serta untuk mendeteksi adanya kasus-kasus yang menyimpang dari tren (anomali).

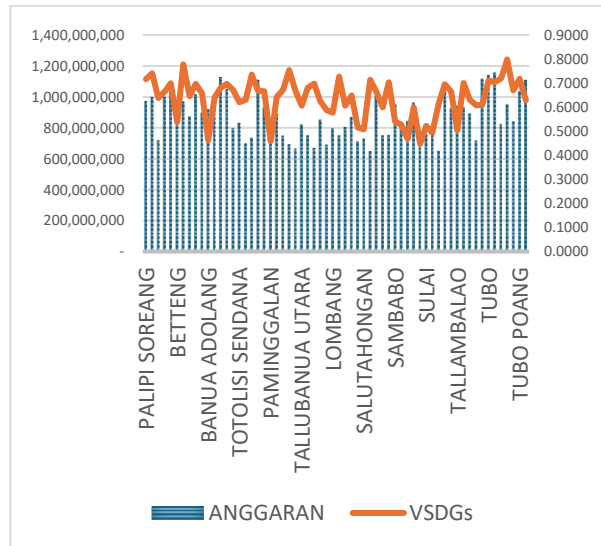
- b) Fase 2: Seleksi dan Analisis Kasus Kualitatif: Berdasarkan temuan pada fase pertama, dua desa studi kasus dipilih secara bertujuan (*purposive*) untuk merepresentasikan fenomena yang kontras. Tahap ini bertujuan untuk menggali secara mendalam "mengapa" dan "bagaimana" strategi pengelolaan anggaran diimplementasikan, serta apa dampaknya, dengan fokus pada proses, aktor, dan konteks.
- c) Fase 3: Sintesis dan Pengembangan Model: Temuan dari kedua fase diintegrasikan untuk membangun argumen yang komprehensif. Hasil sintesis ini kemudian digunakan untuk merumuskan model strategi prioritas alokasi anggaran yang aplikatif dan berbasis bukti.

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif pada Gambar 1 dan Gambar 2, dipilih dua desa studi kasus yang merepresentasikan kondisi yang kontras secara diametral:

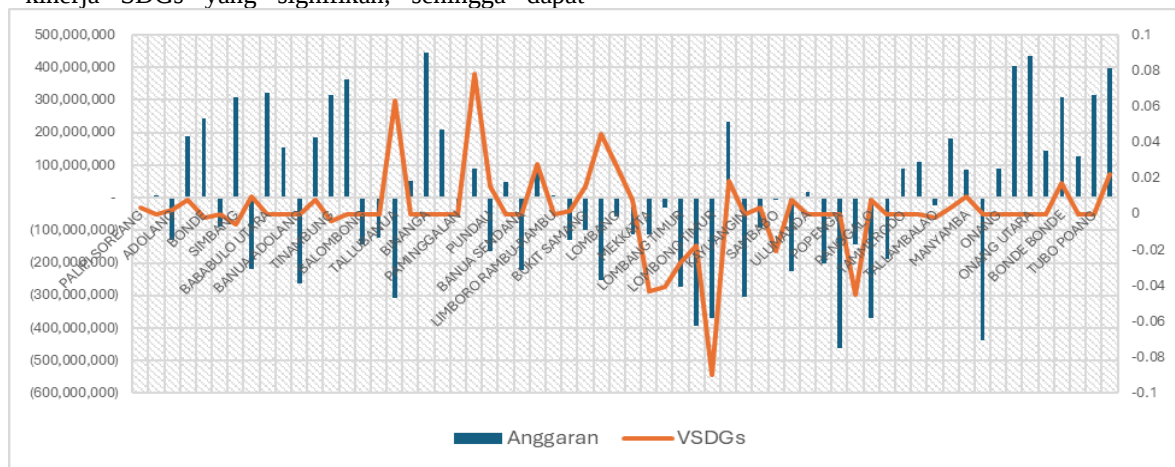
- a) Kasus A: Desa Pamboborang, dipilih sebagai kasus anomali positif. Desa ini menunjukkan peningkatan kinerja SDGs yang signifikan, sehingga dapat

memberikan wawasan mengenai praktik terbaik (*best practices*) dan strategi keberhasilan.

- b) Kasus B: Desa Lombang, dipilih sebagai kasus ilustrasi tipikal. Desa ini merefleksikan tren negatif yang ditemukan dalam analisis statistik (kinerja stagnan meskipun dana besar), sehingga dapat memberikan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor penghambat dan akar masalah ineftektivitas.



Gambar 1. Grafik Perbandingan Anggaran dan SDGs Desa



Gambar 2. Grafik Perbandingan Peningkatan Anggaran dan Peningkatan SDGs Desa 2023-2024

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Analisis Kuantitatif: Paradoks Efektivitas Dana Desa

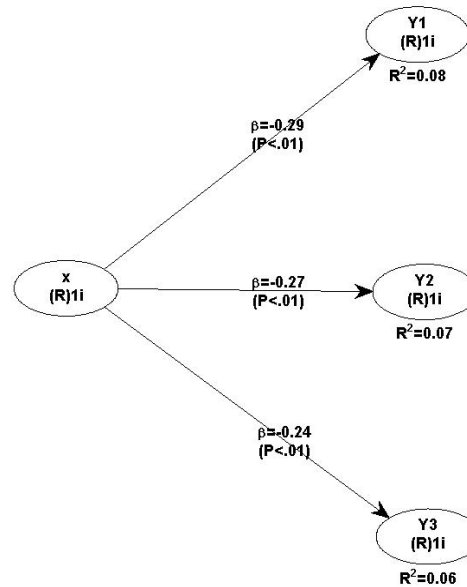
Untuk menguji hipotesis awal mengenai pengaruh dana desa terhadap kinerja pembangunan, dilakukan analisis regresi data panel terhadap 62 desa di Kabupaten Majene selama periode 2022-2024. Mengingat struktur data di mana Skor SDGs Total merupakan agregat dari tiga pilar kinerja, tiga model regresi terpisah dijalankan dengan masing-masing pilar sebagai variabel dependen.

Hasil analisis menggunakan WarpPLS 8.0 disajikan pada Tabel 1 dan Gambar 3.

Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel Pengaruh Dana Desa terhadap Kinerja Pilar SDGs

Model	Hipotesis	Koefisien Beta (β)	P-Value	R-squared (R^2)	Keputusan Hipotesis
1.	Hipotesis 1	-0,290	<0,001	0,084	Diterima
2.	Hipotesis 2	-0,270	<0,001	0,073	Diterima
3.	Hipotesis 3	-0,236	<0,001	0,056	Diterima

Catatan: Indeks kualitas model keseluruhan: APC = 0,266 ($P < 0,001$), ARS = 0,071 ($P = 0,082$), GoF = 0,267 (Medium).



Gambar 3. Hasil Analisis Kuantitatif Paradoks Efektivitas Dana Desa

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan adanya temuan yang signifikan sekaligus menolak sepenuhnya hipotesis awal yang bersifat normatif. Ketiga hipotesis (H1, H2, H3) yang semula memprediksi adanya hubungan positif tidak terbukti. Sebaliknya, temuan penelitian memperlihatkan bahwa:

- Pengaruh signifikan namun negatif: alokasi dana desa terbukti memiliki pengaruh yang signifikan secara statistik terhadap ketiga pilar kinerja SDGs, namun dengan arah yang konsisten negatif. Ini berarti, secara umum di sampel penelitian, peningkatan alokasi dana desa tidak serta-merta meningkatkan kinerja pembangunan, bahkan cenderung berkorelasi dengan penurunan skor kinerja pilar.
- Kekuatan pengaruh bervariasi: pengaruh negatif terkuat ditemukan pada pilar sosial ($\beta = -0,290$), yang mencakup indikator-indikator krusial seperti kesehatan dan pendidikan. Ini diikuti oleh pilar ekonomi ($\beta = -0,270$) dan yang terlemah (meskipun tetap signifikan) pada pilar lingkungan ($B = -0,236$).
- Keterbatasan Daya Penjelas: Rendahnya nilai *R-squared* (rata-rata hanya 7,1%) menyiratkan bahwa besaran dana desa bukanlah faktor determinan utama dalam menjelaskan variasi kinerja antar desa. Ini secara kuat mengindikasikan bahwa ada faktor-faktor lain yang tidak terukur dalam model -seperti kualitas tata kelola, kepemimpinan, dan yang terpenting, strategi alokasi yang berpotensi memainkan peran lebih krusial.

Fenomena statistik diatas terkait “mengapa dana yang lebih besar justru berkorelasi dengan kinerja yang lebih rendah?” menjadi landasan dan justifikasi kuat untuk melakukan analisis kualitatif mendalam. Dipilihlah dua desa dengan karakteristik kontras: Desa Pambobor

ang, sebagai "anomali positif" yang berhasil mematahkan tren, dan Desa Lombang sebagai "ilustrasi tipikal" yang merefleksikan tren negatif tersebut.

3.2. Hasil Analisis Kualitatif: Membedah Mekanisme di Balik Angka

Desa Pambobor, yang berhasil melompat dari status Berkembang menjadi Maju, menjadi bukti hidup bahwa dana desa dapat menjadi katalisator kemajuan yang efektif. Analisis wawancara mendalam dengan Kepala Desa dan Ketua BPD mengungkap adanya pergeseran fundamental dari paradigma administratif rutin menjadi paradigma investasi strategis. Mekanisme keberhasilan ini ditopang oleh sinergi empat pilar:

- Perencanaan Berbasis Bukti sebagai Landasan Utama

Berbeda dengan praktik umum, perencanaan di Pambobor tidak dimulai dari daftar keinginan yang dibawa dalam Musrenbang. Prosesnya diawali dengan diagnosis masalah menggunakan data SDGs. Informan dari Pemerintah Desa secara eksplisit menyatakan, "Kita pakai data, Nak. Bukan pakai perasaan... Saya kumpulkan semua perangkat, BPD, tokoh masyarakat, saya bilang, 'Bapak-bapak, dana kita ini terbatas. Kalau kita bagi-bagi rata, jadi jalan setapak semua, tidak ada yang jadi jalan raya'. Saya paparkan dulu kondisi desa kita pakai data itu... skor ekonomi kita paling merah." Inisiatif ini memungkinkan desa untuk mengidentifikasi titik ungkit (*leverage point*) yang paling strategis, yaitu sektor ekonomi, dan membangun argumen yang rasional untuk memfokuskan sumber daya.

- Kepemimpinan Visioner dan Kemitraan Kritis BPD

Keberhasilan eksekusi strategi sangat bergantung pada sinergi antara Kepala Desa dan BPD. Kepala Desa tidak hanya bertindak sebagai administrator, tetapi juga

sebagai negosiator dan inovator yang mampu menerjemahkan data menjadi visi yang bisa dipahami dan diterima oleh masyarakat. Ia berhasil mengatasi resistensi awal terhadap strategi fokus dengan komunikasi persuasif. Di sisi lain, BPD Pamboborang menjalankan fungsi sebagai mitra kritis. Informan dari BPD menegaskan, *"Kami tidak langsung setuju. Kami minta Pemerintah Desa untuk menyajikan studi kelayakan yang matang... Kami tanyakan, 'Apa jaminannya program ini berhasil? Bagaimana mitigasi risikonya?'"* Sikap kritis BPD yang berbasis pada data dan analisis risiko ini justru memperkuat perencanaan dan memastikan program yang dijalankan memiliki dasar yang solid.

c) Strategi Program Unggulan Terintegrasi

Sebagai manifestasi dari paradigma investasi, desa memfokuskan sumber daya pada program "Modernisasi Pertanian Bawang Merah". Program ini dirancang secara holistik, tidak parsial. Informan dari Pemerintah Desa menjelaskan, *"Bukan lagi sekadar bantuan bibit, tapi satu paket lengkap: kita buat sumur bor komunal... kita kasih bibit unggul... kita datangkan ahli untuk kasih pelatihan, dan yang paling penting, BUMDes kita siap beli hasilnya."* Pendekatan terintegrasi dari hulu (penyediaan air dan bibit) hingga hilir (penjaminan pasar oleh BUMDes) ini mencegah dana tersebar tipis tanpa dampak dan menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di tingkat desa.

d) Pembangunan Modal Sosial sebagai Fondasi Keberlanjutan

Keberhasilan program yang dirasakan langsung oleh masyarakat—seperti peningkatan pendapatan yang memungkinkan renovasi rumah dan pembiayaan pendidikan—menumbuhkan rasa memiliki (*ownership*) dan kepercayaan (*trust*) yang kuat. Informan dari Pemerintah Desa menyimpulkan, *"Mereka merasa ini program mereka, bukan 'proyek Pak Desa'. Itu yang paling mahal harganya buat saya."* Modal sosial inilah yang menjadi bahan bakar utama keberlanjutan program dan membedakan Pamboborang dari desa lain yang masyarakatnya cenderung apatis.

Desa Lombang menunjukkan kinerja yang stagnan meskipun menerima alokasi dana yang besar. Kondisi ini merepresentasikan situasi yang dialami oleh banyak desa dalam sampel penelitian. Analisis kualitatif menemukan bahwa desa ini terjebak dalam apa yang dapat disebut sebagai lingkaran stagnasi infrastruktur.

e) Dikte Kondisi Geografis sebagai Akar Masalah

Isolasi dan kondisi geografis yang sulit menjadi faktor dominan yang membentuk prioritas desa. Informan dari Pemerintah Desa menyatakan, *"fokus utama kami ini selalu soal jalan... Kondisi kita ini kan di pegunungan, terpencil. Kalau jalanan rusak, semua macet... Kebutuhan yang terlihat di depan mata itu yang lebih mendesak rasanya, daripada angka-angka di kertas."*

Hal ini menciptakan prioritas tunggal pada infrastruktur yang sulit dihindari dan mendominasi seluruh siklus perencanaan.

f) Perencanaan "Tambal Sulam" yang Reaktif

Akibatnya, perencanaan dan penganggaran bersifat reaktif dan berorientasi jangka pendek. Anggaran habis untuk perbaikan infrastruktur yang rusak setiap tahun akibat kondisi alam. Informan dari BPD meng gambarkannya dengan sangat tepat, *"Anggaran kita ini habis untuk hal-hal yang bersifat 'bertahan hidup' dan 'tambal sulam'. Ibaratnya, kita punya uang untuk beli obat penurun demam, tapi tidak pernah cukup untuk beli vitamin atau makanan bergizi agar tidak sakit lagi."*

g) Politik Anggaran Merata untuk Harmoni Sosial

Untuk menjaga stabilitas dan menghindari konflik antar dusun, alokasi dana desa cenderung didistribusikan secara merata. Informan dari Pemerintah Desa mengakui, *"Harus begitu. Kalau tidak, bisa jadi omongan. Nanti saya dibilang pilih kasih... Biar dapatnya sedikit-sedikit, yang penting semua dusun merasa diperhatikan."* Praktik ini, meskipun dapat dipahami secara politis dalam konteks lokal, secara efektif mengakibatkan inefisiensi skala, di mana tidak ada program yang cukup besar untuk memberikan dampak signifikan.

h) Keterbatasan Inovasi dan Kapasitas

Kondisi yang sulit dan fokus yang sempit pada masalah rutin membatasi ruang untuk inovasi. Data SDGs, meskipun ada, sulit diterjemahkan menjadi aksi karena terbentur oleh kebutuhan darurat yang lebih mendesak di lapangan. Partisipasi masyarakat pun cenderung pasif. Informan dari Pemerintah Desa menjelaskan, *"mereka cenderung pasrah saja, Nak. Mereka bilang, 'Itu urusan Pak Desa saja, kami ikut'."*

Kasus Lombang memberikan penjelasan mendalam atas hasil statistik. Pengaruh negatif dana desa terjadi bukan karena dana itu sendiri buruk, melainkan karena dana tersebut tersedot ke dalam siklus perbaikan infrastruktur berbiaya tinggi dengan dampak terbatas pada indikator kesejahteraan SDGs, yang diperparah oleh praktik alokasi yang tidak strategis.

3.3. Pembahasan Umum: Sintesis Temuan Kuantitatif dan Kualitatif

Penggabungan hasil kuantitatif dan kualitatif menghasilkan sebuah pemahaman yang komprehensif. Temuan kuantitatif yang menunjukkan pengaruh negatif dana desa berfungsi sebagai sebuah "alarm" adanya masalah efektivitas sistemik. Sementara itu, temuan kualitatif dari studi kasus komparatif berfungsi sebagai "diagnosis" yang menjelaskan mekanisme di balik alarm tersebut

Penelitian ini menegaskan bahwa strategi alokasi merupakan variabel kunci yang memoderasi hubungan antara dana desa dan kinerja pembangunan. Variabel tersebut mampu menjelaskan perbedaan hasil meskipun *input* finansial yang diterima sama. Dengan demikian, strategi alokasi menjadi faktor penentu dalam efektivitas pemanfaatan dana desa.

- a) Di Desa Lombang (dan diduga di banyak desa lain yang mengikuti tren negatif), strategi yang dominan adalah "penyebaran merata untuk pemeliharaan infrastruktur". Strategi ini bersifat reaktif, berbiaya tinggi karena faktor geografis, dan berdampak rendah pada peningkatan skor SDGs, sehingga menghasilkan korelasi negatif dalam model statistik.
- b) Di Desa Pamboborang, strategi yang digunakan adalah "fokus terintegrasi pada titik ungkit ekonomi". Strategi ini bersifat proaktif, investasi, dan menghasilkan dampak berlipat ganda yang mampu meningkatkan skor SDGs secara signifikan, sehingga ia tampil sebagai anomali positif yang berhasil mematahkan tren umum.

Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa perdebatan tentang pembangunan desa tidak seharusnya hanya berfokus pada "berapa banyak" dana yang diberikan, tetapi harus bergeser secara fundamental ke "bagaimana dana tersebut dialokasikan secara strategis". Faktor kepemimpinan yang visioner, perencanaan berbasis data, dan kemitraan yang sehat antar lembaga desa menjadi prasyarat mutlak untuk mengubah dana desa dari sekadar dana administratif menjadi modal investasi pembangunan yang sesungguhnya

4. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa paradoks dana desa tidak terletak pada besaran dana, melainkan pada kualitas strategi alokasinya. Temuan menunjukkan bahwa desa dengan kepemimpinan visioner, perencanaan berbasis bukti, fokus pada program prioritas, dan kemitraan yang sehat, seperti Desa Pamboborang, mampu memanfaatkan dana desa sebagai investasi strategis. Sebaliknya, desa stagnan seperti Desa Lombang terjebak dalam politik anggaran merata dan program berbiaya tinggi namun berdampak minim. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kebijakan dari sekadar kuantitas transfer menuju pengelolaan yang strategis, akuntabel, dan berbasis bukti. Temuan ini menantang asumsi linear "lebih banyak dana = hasil lebih baik" serta memberikan implikasi praktis bagi reformasi perencanaan, penganggaran, kepemimpinan desa, dan insentif inovasi, sekaligus membuka ruang bagi penelitian lanjutan lintas wilayah dan pendekatan metodologis yang lebih beragam.

Daftar Rujukan

- [1] Sachs, J., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F. (2022). *Sustainable Development Report 2022*. Cambridge University Press.

- [2] Sapa', A. B., Haliah, H., & Kusumawati, A. (2024). Public Sector Accounting: A Key to Achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). *Asian Journal of Applied Business and Management*, 3(4), 339–350. <https://doi.org/10.55927/ajabm.v3i4.12250>
- [3] Sutrisna, I. W. (2021). Implementasi Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 1-10. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.239>
- [4] Soraya, Z., Nasrullah, N., & Ayu, N. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Rasio Kemandirian Dan Rasio Efektivitas Pada Desa Kanreapia Kecamatan Tombolopao Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 27-36. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v6i2.5395>
- [5] Swandriano, F. A., & Arif, M. (2023). Efektivitas Program Pemerintah Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 71-82. <https://doi.org/10.35906/jep.v9i1.1401>
- [6] Anandhiya, A., Arifin, A., & Istiqomah, I. (2021). Pengaruh Ketahanan Pangan terhadap Rata-Rata Pengeluaran Masyarakat di Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(1), 96-100. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i1.1258>
- [7] Nurfatimah, S. A., Hasna, S., & Rostika, D. (2022). Membangun kualitas pendidikan di Indonesia dalam mewujudkan program Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Basicedu*, 6(4), 6145-6154. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i4.3183>
- [8] Wulansari, D., Fauziah, R., & Syahputra, A. K. (2022). Pengembangan Aplikasi SDGS menerapkan metode agile dengan framework Codeigniter di BPS Asahan. *J-Com (Journal of Computer)*, 2(2), 77-84. <https://doi.org/10.33330/jcom.v2i2.1725>
- [9] Pratiwi, A. A. P. K., Winayaa, I. K., & Supriyanti, N. W. (2023). Kinerja Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa Inklusif di Desa Pempatan, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem (Studi Kasus Masyarakat Disabilitas). *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1(3), 109-120. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.59>
- [10] Flambonita, S., Ridwan, R., Ahmaturrahman, A., & Apriyani, L. (2022). Pengelolaan dan informasi perencanaan anggaran desa. *Jurnal Pendidikan dan Pengabdian Masyarakat*, 5(4), 378-394. <https://doi.org/10.29303/jppm.v5i4.4227>
- [11] Hidayat, A. S., Djau, R. A., Gobel, F. F., Talango, N., Rauf, W., Palilati, M. P., & Saleh, M. M. (2023). Sosialisasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Untuk Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa Molowahu. *Abdi Wiralodra: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 284-295. <https://doi.org/10.31943/abdi.v5i2.123>
- [12] Zamzami, Z., & Hastuti, D. (2021). Sosialisasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Implementasi UU No. 6 Tahun 2014. *Jurnal Inovasi, Teknologi dan Dharma Bagi Masyarakat*, 3(2), 42-48. <https://doi.org/10.22437/jitdm.v3i2.16373>
- [13] Rachmawati, W. C., & Indudewi, D. (2024). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pembangunan Infrastruktur Desa Blerong. *Solusi*, 22(2), 187-196. <https://doi.org/10.26623/slsi.v22i2.8639>
- [14] Solihah, F., Inapty, B. A., & Suryantara, A. B. (2022). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 2(1), 136-154. <https://doi.org/10.29303/risma.v2i1.191>
- [15] Ngakil, I., & Kaukab, M. E. (2020). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di kabupaten wonosobo. *Journal of Economic, Management, Accounting and*

- Technology, 3(2), 92-107. <https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1283>
- [16] Barus, L. B., & Sinaga, R. Y. (2023). Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Indonesia: Suatu Kajian Fraud Triangle Theory. *Scientium Law Review (SLR)*, 2(1), 1-8. <https://doi.org/10.56282/slr.v2i1.484>
- [17] Mansur, M., Agustang, A., Idhan, A. M., Kadir, Y., & Nuna, M. (2021). Perencanaan Partisipatif Pemerintah Desa Dan Masyarakat Dalam Mengelola Apbdes. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 349-362. <https://doi.org/10.37606/publik.v8i2.244>
- [18] Muhajir, A., Nasution, M. A. H., & Manalu, S. P. R. (2025). Penguatan daya saing pemerintahan desa untuk pembangunan berkelanjutan: Studi Kasus pendampingan di Desa Manunggal. *Jurnal Derma Pengabdian Dosen Perguruan Tinggi (Jurnal DEPUTI)*, 5(1), 381-386. <https://doi.org/10.54123/deputi.v5i1.423>
- [19] Kamila, S. A., Suliswanto, M. S. W., & Sari, N. P. (2021). Pengaruh Dana Desa, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Kondisi Kemiskinan di Kecamatan Empang Kabupaten Sumbawa. *Lensa Ekonomi*, 15(01), 50-63. <https://doi.org/10.30862/lensa.v15i01.143>
- [20] Listiawati, N., Ansari, M. I., Novitasari, E., Fitri, D. N., Ichsan, H., & Tahawa, T. H. B. (2025). Village Sustainable Development Goals (Sdgs): Budgetary, Human Resources, And Technology Contributions. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 9(1), 557-565. <https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2522>
- [21] Sugandi, I., Abdoellah, O., & Gunawan, B. (2023). Achievement of SDGs Desa in Villages Planning and Budgeting Documents. *IOP Conference Series Earth and Environmental Science*, 1211(1), 012001. <https://doi.org/10.1088/17551315/1211/1/012001>
- [22] Mual, R. (2022). Penyelenggaraan Teknis Dan Administrasi Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Kampung-Kampung Di Distrik Supiori Papua. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*, 3(2), 68-77. <https://doi.org/10.46924/jihk.v3i2.151>
- [23] Senprianthi, S., & Rahajeng, D. K. (2022). Analisis kendala peran inspektorat dalam pengelolaan dana desa (Studi kasus pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 10(1). <https://doi.org/10.22146/abis.v10i1.73336>
- [24] Hajri, R., & Razak, L. A. (2023). Pengaruh Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Belanja Desa Pada Desa Buhung Bundang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. *Tangible Journal*, 8(1), 64-71.. <https://doi.org/10.53654/tangible.v8i1.341>
- [25] Rumiaty, A. T., Salsabila, N. Z., Nabilah, A. R., Sari, H. J., & Riza, L. F. (2022). Mapping model for target achievement of village SDGs using the Ensemble ROCK method: A case study of Sidoarjo Regency, East Java. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(1), 316-327. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v11i1.1567>